

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian, bisa disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Bekasi melalui pengelolaan website dan media sosial telah berjalan dengan baik dan efektif. Berdasarkan teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan beberapa poin penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Dalam indikator komunikasi, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif baik di dalam organisasi maupun dengan masyarakat. Diskominfo dan PPID Kota Bekasi memastikan koordinasi yang baik melalui rapat rutin dan kolaborasi untuk verifikasi informasi sebelum publikasi. Pada indikator sumber daya, terdapat tantangan signifikan seperti keterbatasan tim media sosial yang hanya terdiri dari satu orang yang bertugas selama 24 jam. Pemerintah Kota Bekasi berupaya mengatasi kekurangan ini melalui program magang dan kolaborasi antar unit kerja, serta dukungan teknologi yang memadai. Namun, pengadaan perangkat dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala, sehingga prioritas pengadaan perangkat daerah menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan tugas yang efektif.

Indikator disposisi menunjukkan sikap dan komitmen positif dari para pejabat dalam mengutamakan pelayanan publik, meskipun resistensi dan ketidakpatuhan masih terjadi. Pemerintah mengatasi hambatan ini melalui laporan langsung kepada atasan untuk mempercepat proses pemberian informasi. Hal ini menyoroti pentingnya kolaborasi antarbagian dan komunikasi efektif dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan publik. Terakhir, indikator struktur birokrasi menunjukkan adanya integrasi yang kuat dan koordinasi efektif dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal ini mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat, sehingga tujuan keterbukaan informasi di Kota Bekasi dapat tercapai dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bekasi telah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah Kota Bekasi menegakkan akuntabilitas melalui Humas sebagai PPID Utama yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengkonfirmasi informasi kepada publik, menjaga akurasi dan kepercayaan. Transparansi dijaga dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses melalui media sosial dan website, serta mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan undang-undang yang berlaku.

Keterbukaan diukur melalui kemudahan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam survei kepuasan, analisis kunjungan website, dan forum diskusi. Kepatuhan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan hak cipta dijaga melalui konsultasi hukum, memastikan

tidak ada pelanggaran hak cipta. Responsivitas tinggi ditunjukkan dengan menyediakan saluran informasi untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan efektif. Kesetaraan diimplementasikan dengan memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi melalui berbagai media. Efektivitas dan efisiensi diukur melalui sejauh mana informasi memenuhi kebutuhan masyarakat dan penggunaan sumber daya yang optimal. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bekasi mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *good governance*, termasuk akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, kepastian hukum, partisipasi, responsif, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi.

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian, persepsi stakeholder tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan website dan media sosial Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan bahwa meskipun sudah efektif dalam beberapa aspek, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi dan responsivitas PPID serta interaktivitas dengan masyarakat. Informasi yang disajikan umumnya dinilai jelas dan membantu, namun respon terhadap isu-isu kompleks atau sensitif kadang lambat. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, diperlukan peningkatan transparansi, keterbukaan informasi, dan responsivitas terhadap pertanyaan serta masukan masyarakat.

Pada aspek evaluasi, implementasi keterbukaan informasi publik melalui media sosial dan website menunjukkan hasil positif namun memerlukan

perbaikan. Akuntabilitas dan pelayanan cukup baik, terutama dengan layanan di luar jam kerja, namun transparansi dan penyajian informasi lebih detail perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat aktif, tetapi ada tantangan dalam kesetaraan akses informasi bagi kelompok yang kurang terjangkau teknologi. Efektivitas dan efisiensi dinilai baik, namun responsivitas pemerintah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Upaya peningkatan transparansi, responsivitas, dan akses informasi yang inklusif sangat penting untuk mencapai prinsip-prinsip good governance di Kota Bekasi.

5.2 Rekomendasi

Penulis dalam bagian ini menyampaikan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini adapun rekomendasi yang diberikan berbagai menjadi dua yakni, pertama rekomendasi yang bersifat akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis, sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Penulis dalam bagian ini menyampaikan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini adapun rekomendasi yang diberikan berbagai menjadi dua yakni, pertama rekomendasi yang bersifat akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini bisa dijadikan, bahan pertimbangan untuk menambah keilmuan khususnya ilmu Administrasi Negara terkait implementasi

kebijakan keterbukaan informasi publik dalam penerapan *good governance* di Kota Bekasi (pengelolaan media sosial dan *Website* Pemerintah) Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa atau penelitian lanjut atas topik yang sama serta peneliti lain dapat melanjutkan penelitian lanjutan dengan teori-teori dan metodologi yang berbeda agar hasil yang di dapat dikembangkan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal,

2. Untuk mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi agar dapat menjadi sebuah pembelajaran ilmu mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam penerapan *good governance* sehingga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif mengenai keterbukaan informasi publik serta kontribusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
3. Bagi Universitas "45" Bekasi semoga dengan hasil peneliti ini dapat bermanfaat untuk banyak orang terutama untuk mahasiswa dan dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik untuk ke depannya.
4. Untuk topik penelitian selanjutnya sebagai kelanjutan dari penelitian ini melibatkan lebih banyak stakeholder dari berbagai kalangan, seperti masyarakat umum, akademisi, LSM, dan praktisi media. Ini dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dan komprehensif mengenai keterbukaan informasi publik. Penggunaan indikator Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) memang

relevan, namun mungkin ada indikator lain yang lebih spesifik untuk mengukur keterbukaan informasi publik dalam konteks digital.

5. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, terutama tim media sosial yang hanya terdiri dari satu orang, menjadi hambatan signifikan. Untuk penelitian mendatang, disarankan agar ada upaya lebih lanjut untuk meneliti bagaimana tambahan sumber daya dapat meningkatkan efektivitas dan responsivitas kebijakan keterbukaan informasi
6. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dapat memiliki bias interpretatif. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode campuran (mixed methods) untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan mengurangi potensi bias.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud ingin memberikan rekomendasi atau saran bagi lembaga atau instansi dengan harapan dapat bermanfaat bagi lembaga atau instansi tersebut, yaitu:

1. Mengingat keterbatasan jumlah personel yang mengelola media sosial, Pemerintah Kota Bekasi perlu menambah tenaga kerja atau memanfaatkan sumber daya manusia dari unit kerja lain secara rotasional. Penggunaan program magang dan kolaborasi antarunit dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan responsivitas.

2. Pemerintah Kota Bekasi perlu meningkatkan kompetensi dan kapasitas tim pengelola informasi, termasuk pengelola *Website* dan media sosial, melalui pelatihan rutin dan bimbingan teknis. Penguatan tim ini akan membantu meningkatkan responsivitas dan efisiensi dalam melayani permintaan informasi publik.
3. Pemerintah Kota Bekasi perlu memastikan dukungan teknologi yang memadai, termasuk infrastruktur komputer yang stabil dan perangkat lunak manajemen konten yang terintegrasi. Prioritas pengadaan perangkat daerah menjadi krusial untuk mendukung pelaksanaan tugas yang efektif.
4. Pemerintah Kota Bekasi harus meningkatkan transparansi dengan menyajikan informasi yang lebih detail dan mudah diakses. Penyajian informasi harus memenuhi standar yang ditetapkan serta mengikutsertakan *feedback* dari masyarakat untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi.
5. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Pemerintah Kota Bekasi perlu mempercepat waktu respons terhadap pertanyaan dan masukan masyarakat. Menyediakan saluran komunikasi yang lebih cepat dan efektif, seperti *chatbot* atau layanan pesan instan, dapat membantu meningkatkan interaksi dan responsivitas.
6. Mengoptimalkan penerapan prinsip keterbukaan dengan menggunakan survei kepuasan masyarakat dan analisis kunjungan *Website* untuk menilai kebutuhan dan preferensi informasi masyarakat. Hal ini dapat membantu

dalam menyediakan informasi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan publik.

7. Untuk memastikan kesetaraan akses, Pemerintah Kota Bekasi harus mempertimbangkan cara-cara alternatif untuk menyebarluaskan informasi kepada kelompok masyarakat yang kurang terjangkau oleh teknologi.
8. Pemerintah Kota Bekasi perlu mengimplementasikan Perki 2021 secara konsisten dengan memastikan bahwa setiap permohonan informasi mencantumkan tujuan penggunaan yang jelas dan melampirkan bukti legalitas bagi *Non-Government Organization* (NGO).